

1

Link and Match Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial **Social Welfare Services Research and Development's Link and Match**

Mumu Suherlan

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta,
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Nitipuran, Yogyakarta. Email: mumusuherlan@gmail.com.
Diterima 3 Mei 2013, disetujui 17 Juni 2013.

Abstract

The Ministry of Social Affairs as the main actor on social welfare services should provide appropriate social policies to overcome the current social problems. Research and development is a bridge to reach social welfare services effectiveness and efficiency. The linkage of research and development products and their applications by operational programs of social services should be established as good as possible in order to build proportional qualified interactive suitability, it's called as link and match between research and development products with the absorbance ability of operational unit. B2P3KS as a research and development organization of social welfare services models maker should refers problems and strategic issues to policy level that faced by operational units. Moreover, research and development also should referes problems and strategic issues to empirical level. Through link and match concept, research and development products are expected to able to solve and overcome social problems and increase social welfare.

Keywords: Social Welfare Services-Link and Match-Research and Development

Abstrak

Kementerian Sosial RI sebagai pelaksana utama pelayanan kesejahteraan sosial harus menyediakan kebijakan sosial yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan untuk mencapai pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara hasil penelitian dan pengembangan dengan aplikasinya haruslah dibangun sedemikian rupa untuk membentuk kesesuaian interaktif yang tepat dan berkualitas, inilah yang kemudian disebut dengan *link and match* antara hasil penelitian dengan daya serap unit operasional. B2P3KS sebagai lembaga penelitian dan pengembangan penyusun model pelayanan kesejahteraan sosial harus merujuk masalah dan isu strategis pada level kebijakan yang dihadapi unit operasional serta pada level empirik. Melalui konsep *link and match*, hasil penelitian dan pengembangan diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Link and match-Penelitian dan Pengembangan-Pelayanan Kesejahteraan Sosial

A. Pembangunan Sosial

Prioritas pembangunan dirumuskan melalui proses panjang pemikiran perumusan kebijakan yang tentu mempertimbangkan kearifan masyarakat. Suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi adalah satu cara untuk mengurai permasalahan yang ada dan tentunya dibutuhkan data yang rasional, matang dan akurat. Pengambilan kebijakan melalui bukti berbasis penelitian kini makin diminati. Selain lebih memberikan gambaran faktual mengenai permasalahan yang terjadi, juga lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka.

Namun banyak hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan berbasis penelitian, yaitu cara memastikan hasil penelitian dapat diakses oleh para pelaku kebijakan dan digunakan secara lebih efektif karena tidak mudah menjembatani pemikiran pengambil kebijakan dengan peneliti. Kedua elemen ini dipengaruhi dan dilatarbelakangi banyak hal yang berbeda, misalnya nilai, struktur kekuasaan, dan struktur kelembagaan. Oleh karena itu, mengurangi kesenjangan antara penelitian dan kebijakan menuntut tak hanya cara efektif pemanfaatan penelitian tetapi juga cara perumusan kebijakan.

Masalah sosial tidak lagi sederhana. Masyarakat yang dinamis dan selalu berubah membuat masalah sosial juga berkembang. Kemiskinan, pengangguran, kecacatan, *trafficking*, *cyber-crime* hingga masalah budaya seperti perceraian, kriminalitas remaja, dan ketidakdisiplinan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan penelitian yang tidak akurat dan tidak lengkap. Pelibatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam segala bidang merupakan hal yang mutlak dilakukan apabila bangsa kita memiliki keinginan kuat untuk mengubah tatanan hidup bernegara secara lebih baik dan kondusif, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Meskipun upaya peningkatan kualitas penelitian makin santer terdengar, tetapi realitas dorongan dan upaya meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dinilai masih berproses

secara lamban, baik secara fungsional maupun institusional.

Pemerintah sudah sepantasnya mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi munculnya penelitian yang berkualitas, terlebih di era keterbukaan berbagai jenis kebijakan pemerintah memang seharusnya mempunyai pijakan kuat yang idealnya berbasiskan hasil penelitian, dengan demikian pengambilan keputusan didasari bukti dan analisis penelitian. Demikian halnya penyelenggaraan kebijakan dan strategi dituntut untuk dapat menampung aspirasi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan sosial, kehidupan yang demokratis dengan nilai dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjamin perlindungannya.

Kementerian Sosial RI sebagai pelaksana utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus memberikan kebijakan sosial yang mampu mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan jembatan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan kesejahteraan sosial. Keberhasilan penanganan permasalahan sosial banyak ditentukan oleh seberapa besar peran dan kontribusi penelitian dan pengembangan dalam berbagai bentuk. Formulasi hasil penelitian dapat berupa konseptualisasi model dan juga aplikasi model penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Pertautan hasil litbang dengan aplikasinya melalui program operasional harus terjalin sedemikian rupa sehingga membentuk kesesuaian interaktif yang proporsional dan berkualitas, yang kemudian disebut sebagai konstruksi *link and match* antara hasil litbang dan daya serap unit operasional.

B. Kebijakan Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan sosial didefinisikan secara berbeda oleh beberapa tokoh seperti Marshall, Rein, Hutman, dan Hill. Marshall mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan

warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial. Menurut Rein, kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.

Magil mendefinisikan kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik yang meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan, dan keamanan. Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk tujuan sosial. Spicker menyatakan bahwa kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan, baik dalam arti luas yang menyangkut kualitas hidup manusia maupun dalam arti sempit yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat. Bessant, Watts, Dalton dan Smith mengungkapkan bahwa kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program tunjangan sosial lain.

Dari semua definisi tersebut, kebijakan sosial merujuk pada tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tunjangan-tunjangan sosial. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental), sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warga. Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial.

Peran pemerintah diuji melalui kebijakan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat yang terdiri atas beberapa dimensi dasar kebijakan sosial, yaitu redistribusi kekayaan, kebebasan, perlindungan risiko,

keselamatan publik, dan pelayanan sosial. Berbagai dimensi tersebut yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Dalam konstelasi kebijakan dan praktik, diperlukan *link and match* antara landasan konstitusi, kebijakan sosial pada tingkat makro, program atau praktik aktual pada tingkat mikro.

C. *Link and Match* dalam Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Peran penelitian dan pengembangan (litbang) sangat menentukan bagi terciptanya sebuah kebijakan yang *responsive* terhadap kebutuhan peningkatan kesejahteraan sosial. Litbang juga dapat memperkecil terjadinya paradigma aksi reaksi, yaitu para pengambil kebijakan merumuskan, membuat, dan menetapkan kebijakan, tetapi tanpa terlebih dulu melakukan pengkajian sehingga mungkin saja tidak memperhitungkan sebab timbulnya masalah tersebut serta efek turunan yang mungkin akan timbul.

Lembaga litbang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, telah menyusun rencana tindak (*scenario planning*) terhadap masalah yang ada bahkan memberikan prediksi dan solusi pemecahannya. Namun skenario ini terkadang tidak dipakai, dalam arti kegiatan penelitian hanya berhenti sampai penelitian tetapi tidak dilanjutkan dengan pengembangan kebijakan yang disusun. Sebaliknya, kebijakan yang disusun sering tidak didasari hasil penelitian, terkesan disusun berdasar kejadian sesaat (*by accident*) bukan merupakan sebuah kajian yang matang dan didasari perencanaan dan litbang yang baik (*by design*).

Oleh karena itu, di beberapa organisasi, peran penelitian selalu disandingkan dengan pengembangan. Penelitian dan pengembangan dalam garis besarnya mempunyai dua arti penting yaitu penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*inovation*). Kemajuan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat tidak terlepas dari peranan penelitian dan pengembangan. Kedua kata ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait. Sebuah penelitian dalam pemecahan

secara ilmiah harus melakukan pengembangan dan perbaikan, sebaliknya, pengembangan haruslah didasari pemikiran ilmiah.

Dalam memecahkan dan mengatasi permasalahan sosial dan isu strategis yang berkembang di masyarakat, diperlukan kebijakan sosial. Proses penyusunan kebijakan sosial haruslah melalui penelitian sosial yang menemukan (*discovery*) permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga mencari solusi (*solue*). Untuk mendukung terciptanya kesejahteraan sosial dan terselesainya masalah sosial di Indonesia melalui perumusan kebijakan dan program serta model penanganan masalah sosial, Kementerian Sosial RI melaksanakan dua jenis penelitian:

1. Penelitian Kebijakan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial dalam lingkup kebijakan sosial, dengan melakukan perumusan naskah kebijakan sosial dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Penelitian Terapan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan sosial melalui pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial dalam lingkup pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial, dengan melakukan perumusan naskah hasil uji coba model dalam lingkup pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sosial, Kementerian Sosial RI memiliki tiga lembaga penelitian dengan diferensiasi kegiatan penelitian:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, berfokus pada penelitian kebijakan makro yang meliputi sistem perundangan dan sistem perpajakan yang kemudian menghasilkan formulasi kebijakan penanganan permasalahan sosial;
2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, berfokus pada perumusan dan pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial (UKS, Program, dan Intervensi) dalam tataran

mikro, dan akhirnya menghasilkan model pelayanan kesejahteraan sosial;

3. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, berfokus pada pengembangan konseptual/*framework* (teori dan praktik pekerjaan sosial) yang menghasilkan kerangka kerja praktik pekerjaan sosial.

Ketiga lembaga ini bersinergi dalam rangka mengungkap berbagai fenomena dan memberi analisis terhadap berbagai pertanyaan terkait penanganan masalah sosial. Ketiganya bersinergi dalam rangka memberi dasar pijakan yang jelas bagi terciptanya model penanganan masalah sosial yang *up to date*. Proses perumusan kebijakan sosial dalam rangka penanganan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial mengharuskan adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas teknis, pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan perguruan tinggi untuk optimalisasi hasil yang dicapai. Sinergitas juga dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan data dan sumber daya yang diperlukan dalam proses penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Konstruksi *link and match* antara kegiatan penelitian dan pengembangan dengan kegiatan operasional dalam rangka penanganan PMKS secara optimal ini ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkessos) dengan dicanangkannya sebagai salah satu kebijakan atau strategi dalam menciptakan sinergi antara kegiatan penelitian (yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badiklitkessos) dengan kegiatan unit operasional di lingkungan Kementerian Sosial RI. Implikasi dari penerapan kebijakan *link and match* ini adalah bahwa riset yang dilakukan oleh Badiklitkessos hendaknya relevan dengan kebutuhan unit operasional sehingga hasilnya dapat diterapkan secara optimal. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan Badiklitkessos hendaknya dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan. Dengan kalimat lain, kebijakan yang dicanangkan oleh unit operasional hendaknya berbasis hasil riset. Secara internal kebijakan *link and match* ini diterapkan terhadap 13 Satker yang ada di bawah Badiklit Kesos dan secara eksternal kebijakan ini disosialisasikan terhadap semua unit operasional di Kementerian Sosial RI.

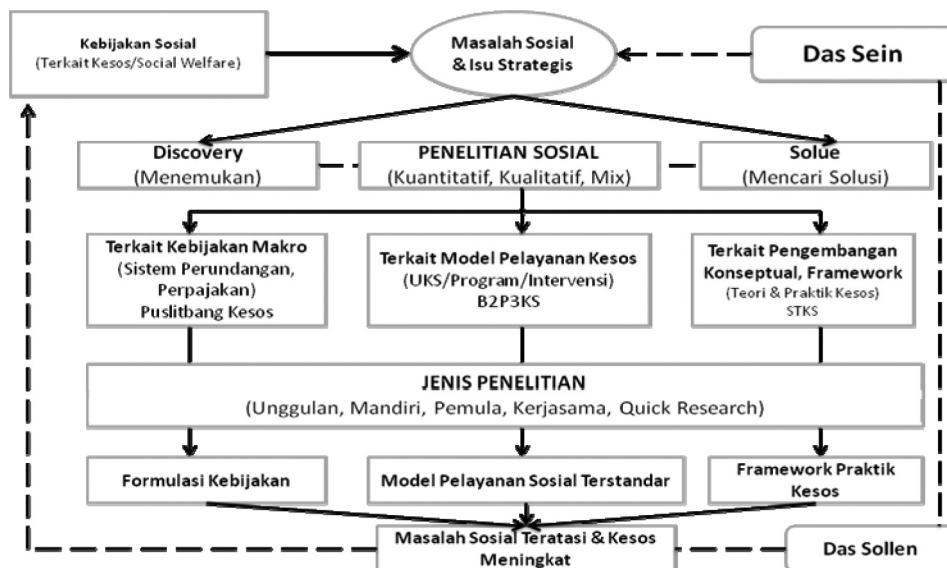
Strategi umum *link and match* yang dilontarkan Menteri Sosial dan ditindaklanjuti Badiklitkesos ditunjukkan pada Gambar 1, sedangkan proses *link and match* dalam lingkup tugas penelitian dan pengembangan di Badiklitkesos dalam rangka penanganan permasalahan sosial ditunjukkan pada Gambar 2.

D. Link and Match dalam Eksistensi B2P3KS sebagai Perumus Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta merupakan salah satu lembaga penelitian di lingkungan Kementerian Sosial RI yang ada di daerah. Keberadaan B2P3KS sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menjamin kepentingan masyarakat



Gambar 1. Strategi Membangun Link and Match (Hikmat, 2012)



Gambar 2. Proses Link and Match dalam Lingkup Tugas Penelitian dan Pengembangan Badiklitkesos, Kementerian Sosial RI

melalui penyediaan pelayanan publik yang tidak dapat disediakan oleh organisasi swasta secara profesional, akuntabel, dan transparan. Sebagai suatu lembaga penelitian terapan yang menghasilkan model-model pelayanan kesejahteraan sosial dan rekomendasi kebijakan pada Menteri Sosial RI dan unit teknis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, B2P3KS mendasarkan diri pada prinsip formulasi kebijakan dalam pelaksanaan berbagai tugas, yakni terarah pada pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan oleh unit teknis untuk menangani permasalahan PMKS dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Perhatian utama dalam lembaga penelitian perumus kebijakan publik terletak pada identifikasi berbagai permasalahan serta pengembangan berbagai alternatif upaya pemecahan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kerangka teori, analisis, serta nilai yang dianut oleh *policy maker* dan cara pandang *stakeholders* terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas. Perumusan kebijakan publik menekankan pada aktor yang terlibat, pola interaksi di antara aktor-aktor yang terlibat, dan sumber daya yang dimiliki aktor-aktor tersebut.

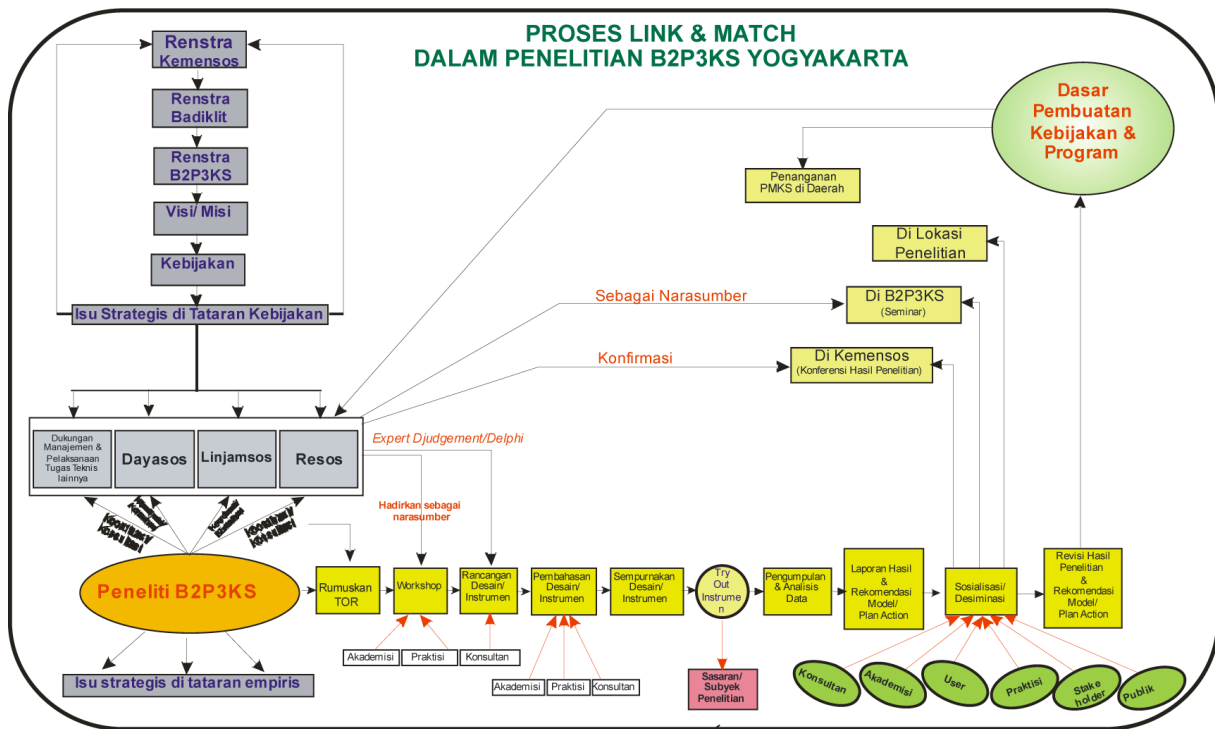
Terkait dengan dibutuhkannya model-model pelayanan kesejahteraan sosial terstandar dalam rangka penanganan PMKS yang semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dapat dipenuhi apabila B2P3KS dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI no 57/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja B2P3KS yang menyebutkan, bahwa tugas pokok B2P3KS adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsi spesifik B2P3KS adalah melakukan standarisasi dan sosialisasi sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Sistem pelayanan kesejahteraan sosial sendiri pada hakikatnya terdiri dari enam komponen : (1) Prosedur pelayanan kesejahteraan sosial, (2) Sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, (3) Waktu pelayanan kesejahteraan sosial, (4) Biaya pelayanan kesejahteraan sosial, (5) Kompetensi petugas pelayanan

kesejahteraan sosial, dan (6) Produk pelayanan kesejahteraan sosial.

Atas dasar acuan hukum tersebut, B2P3KS bertugas untuk melaksanakan *research & development* yang hasilnya menjadi dasar bagi upaya penyusunan dan pengembangan kebijakan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan kalimat lain, berbagai informasi yang sangat diperlukan para penyusun kebijakan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dihasilkan melalui *research and development* dengan karakteristik yang spesifik. Terkait proses *link and match* dalam penelitian B2P3KS dapat ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 2 menjelaskan, bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh B2P3KS mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis di level kebijakan yang dihadapi oleh (atau menjadi kebutuhan) unit operasional, yaitu Dirjen Dayasos, Dirjen Linjamsos, Dirjen Dayasos dan dukungan manajemen lainnya. Di samping itu, penelitian yang dilaksanakan juga mengacu pada masalah atau isu strategis yang berkembang di tataran empiris. Dari hasil *need assessment* kebutuhan penelitian di unit teknis dan kajian empiris yang dilakukan, peneliti merumuskan *term of reference (TOR)* penelitian. Pada tahap selanjutnya dilakukan *workshop* dengan menghadirkan *expert* dari unit operasional sebagai narasumber, konsultan dari perguruan tinggi dan praktisi dari lapangan (calon lokasi penelitian). *Workshop* yang dilakukan memberikan masukan yang cukup komprehensif bagi para peneliti, baik secara konseptual maupun secara praktis tentang masalah/isu yang diangkat dan kemudian dituangkan dalam desain dan instrumen penelitian.

Khusus untuk penelitian unggulan, metode yang diterapkan adalah *research and development (R&D)* dan bersifat *multiyears*. Dengan metode ini, maka dalam penyusunan instrumen penelitian dilakukan *expert judgement* dengan teknik *Delphi* atau *focus group discussion*. Dalam rangka memperoleh instrumen yang *valid* dan *reliable* sebagai alat pengumpul data, dilakukan *try out instrument*. Atas dasar hasil *try out* dapat ditetapkan instrumen baku yang akan digunakan dalam pengumpulan



Gambar 3
Aplikasi Link and Match dalam Penelitian B2P3KS

data. Selanjutnya setelah pengumpulan data, dilakukan pengolahan dan analisis data, kemudian diakhiri dengan pembuatan laporan hasil penelitian.

Sebagai klarifikasi dengan unit teknis dan berbagai pihak terkait, hasil penelitian dipaparkan dalam konferensi hasil penelitian di Jakarta dengan difasilitasi oleh Badiklit Kesos. Hasil penelitian juga diseminarkan di B2P3KS dengan menghadirkan unit teknis sebagai salah satu pembahas di samping konsultan dan praktisi. Hasil penelitian berupa *prototype model* pelayanan kesejahteraan sosial kemudian disosialisasikan di daerah untuk memperoleh masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan. Hasil penelitian pada tahun pertama ini menjadi bahan untuk melakukan ujicoba model, baik dalam lingkup terbatas maupun dalam lingkup luas, yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

E. Gagasan Akhir

Munculnya konsep *link and match*, menunjukkan adanya perubahan dan pergeseran, *rising demand* (tuntutan yang berkembang) dari masyarakat terhadap jumlah, mutu, jenis, dan kualifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan. Perubahan, pergeseran, dan pertambahan tuntutan merupakan akibat langsung dari perkembangan dan pemekaran pengalaman manusia, khususnya dalam era teknologi informasi modern. Kebutuhan hidup, permasalahan, dan dinamika masyarakat yang makin berkembang menyebabkan kebutuhan akan pelayanan kesejahteraan sosial juga berubah dan berkembang. *Link and match* juga dibutuhkan sebagai upaya menjembatani kebutuhan program layanan unit teknis pelaksana pelayanan dengan penyedia program layanan kesejahteraan sosial. Sinergitas di dalam lembaga penelitian dan pengembangan itu sendiri juga dibutuhkan terutama dalam rangka perencanaan kebutuhan model pelayanan kesejahteraan sosial yang factual dan actual

serta penyediaan sumber daya manusia dalam mewujudkan hasil penelitian yang tepat sasaran dan bermanfaat.

Pentingnya kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial membuat B2P3KS memerhatikan pengembangan aspek keilmuan, isu strategis, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan juga kelembagaan. Oleh karena itu, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) B2P3KS Yogyakarta menjadi hal yang penting dilakukan, mengingat lembaga ini mempunyai tugas yang spesifik dan strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Di samping itu, perubahan SOTK akan terus bergulir sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, dinamika politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang keseluruhannya menuntut ke arah yang lebih baik.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Amin M. 1996. *Perspektif "Link and Match" Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Agama Islam (Rekonstruksi atas Tinjauan Metodologi Pembudayaan Nilai-nilai Keagamaan)*. JPI. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UII.
- Anonim, Keputusan Menteri Sosial RI No. 57/HUK/2003 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)* di Yogyakarta.
- Anonim, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 76/HUK/KEP/XII/1984 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)* di Yogyakarta.
- Anonim, Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/Huk tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
- Anonim, Peraturan Pemerintah RI nomor 102 tahun 2000 tentang *Standardisasi Nasional*
- Anonim, Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I* Kementerian Negara;
- Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967).
- Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
- Anonim, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
- Dunn, William, N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Etzioni, Amitai. (1985). *Organisasi-Organisasi Modern*, penerjemah Suryatim, Jakarta: UI Press.
- Gall, M.D, Gall, J.P, & Borg, WR. (1983). *Educational Research*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Habibullah. 2010. *Definisi Kebijakan Sosial*. kebijakansosial.wordpress.com/2010/01/29/definisi-kebijakan-sosial/. Diakses tanggal 18 April 2013
- Hikmat, Harry. (2012). Arah Kebijakan dan Program Diklat dan Litbang, Disampaikan pada Musrenbangkesos Tahun 2013 Tanggal 10-13 Juli 2012, Jakarta
- Interplan (The International Group for Studies in National Planning)*. (1969). *Appraising Administrative Capability for Development*, New York: United Nations.
- Kurt Lewin. (1951). *Field Theory in Social Science*.
- Lasswell, Harold, (1971). *A Pre-View of Policy Sciences*, New York: American Elsevier Publishing, Company.
- Majalah Astek, edisi bulan Mei 1991.
- Nehru, Jawaharial. (2009). *India Perpectives*, Koran Kompas tanggal 25 Februari 2009
- Quade, E.S. (1975). *Analysis for Public Decisions*, New York: American Elsevier Publishing, Company.
- Rossi, Peter H. And Freeman, Howard E (1985). *Evaluation A Systematic Approach*, Third Edition, Beverly Hills, California 90212: Sage Publications, Inc.
- Wahono, (1996). *Peningkatan Kualitas Tenaga Peneliti*, Bahan Ceramah pada Rapat Konsultasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, April 1996, Jakarta: LIPI.